

**PENGARUH PENGGUNAAN BUKU AJAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN BERPERSPEKTIF GENDER TERHADAP
PENINGKATAN PENGETAHUAN KESETARAAN GENDER PADA SISWA
KELAS LIMA SDN KEDOKAN BUNDER 1
KECAMATAN KEDOKAN BUNDER KABUPATEN INDRAMAYU**

Nunung Nurjanah¹

¹PGSD STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu

¹nunungnurjanah22@gmail.com

Ratna Dewi Lestyorini²

²PGSD STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu

²ratna.dewilestyorini@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is the lack of knowledge of gender equality in elementary school students which raises various attitudes and actions that tend to be discriminatory and unfair to one party, especially female students. The purpose of this study is to determine the effect of using a gender perspective textbook on Pancasila and Civic Education on increasing knowledge of gender equality in fifth grade students of Kedokan Bunder Public Elementary School 1 in Indramayu Regency. The research method used is descriptive qualitative research. With data collection methods used include observation, interviews and tests. The research subjects were the fifth grade students of Kedokan Bunder 1 Elementary School, Indramayu Regency with the number of students 40. The results showed that the textbook on gender education had a gender perspective influencing the gender knowledge of fifth grade students of Kedokan Bunder Public Elementary School 1 Indramayu Regency. This is shown by comparing the results of the pretest on the material about rights and obligations associated with gender equality, the result is that 56% of students answered incorrectly, and 44% answered correctly. after learning the citizenship education subjects by using Pancasila dan Civic Education textbooks with a gender perspective, students 'knowledge increased, this was evident in the posttest results regarding the material on citizens' rights and obligations related to gender equality, showing 87% of students answered correctly, and 13 % answered incorrectly.

Keywords: *textbooks, Pancasila and Civic Education, gender equality, elementary school*

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini yaitu rendahnya pengetahuan akan kesetaraan gender pada siswa sekolah dasar yang menimbulkan berbagai sikap dan tindakan yang cenderung diskriminatif dan tidak adil bagi salah satu pihak terutama siswa perempuan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berperspektif gender terhadap peningkatan pengetahuan akan kesetaraan gender pada siswa kelas lima Sekolah Dasar Negeri Kedokan Bunder 1 Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Metode

pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan tes. Subyek penelitian yakni siswa kelas lima Sekolah Dasar Negeri Kedokan Bunder 1 Kabupaten Indramayu dengan jumlah siswa 40. Hasil penelitian diketahui bahwa buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperspektif gender berpengaruh terhadap pengetahuan gender siswa kelas lima Sekolah Dasar Negeri Kedokan Bunder 1 Kabupaten Indramayu. Hal ini ditunjukkan dengan membandingkan hasil *pre-test* mengenai materi tentang hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan kesetaraan gender, hasilnya sebanyak 56% siswa menjawab tidak tepat, dan 44% menjawab tepat. Setelah dilakukan pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperspektif gender pengetahuan siswa meningkat, hal ini tampak pada hasil *post-test* yang mengenai materi tentang hak dan kewajiban warga negara yang dikaitkan dengan kesetaraan gender, menunjukkan hasil 87% siswa menjawab benar, dan 13% menjawab tidak tepat.

Kata Kunci: buku ajar, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kesetaraan gender, sekolah dasar

A. PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan salah satu landasan bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan, nilai serta keterampilan dasar yang akan mempengaruhi pandangan dan pemikiran mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan dasar berpengaruh besar untuk kehidupan siswa di masa yang akan datang. Pendidikan dasar diharapkan tidak hanya berperan mentransformasi nilai yang ada di masyarakat, namun juga berperan dalam mengedukasi siswa untuk mempelajari nilai – nilai yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender, mengingat tingginya persoalan ketidakadilan dan ketimpangan gender yang terjadi di tengah masyarakat. Berbagai bentuk

diskriminasi dalam kehidupan masyarakat seringkali dianggap wajar dan lumrah seperti pernikahan anak, eksploitasi anak dalam berbagai bentuk, perbedaan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, dan masih kuatnya anggapan bahwa perempuan memiliki peran di ranah domestik, sedangkan laki-laki di ranah publik sehingga tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Kondisi tersebut mengalienasi perempuan dari berbagai peran dan kontribusi yang dapat diberikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dari lembaga pendidikan sebagai salah satu *agent of change* untuk membangun kehidupan yang lebih adil dan memberikan kesamaan

kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya upaya yang sistematis untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh semua pihak termasuk lembaga pendidikan, maka ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender akan tetap menjadi sumber persoalan sosial yang tidak jarang menimbulkan efek domino. Oleh karena itu, kontribusi lembaga pendidikan khususnya pada tingkatan sekolah dasar penting dilakukan. Salah satu unsur penting dalam pendidikan yakni buku ajar yang digunakan acuan bagi guru dan siswa dalam mempelajari dan memahami materi yang akan dipelajari. Buku ajar membantu siswa untuk memahami materi yang diajarkan, dan buku ajar dapat menjadi media bagi internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa buku ajar yang digunakan untuk sekolah dasar khususnya kelas lima, diketahui bahwa baik materi maupun gambar yang disajikan masih kurang memperhatikan kesetaraan gender. Kondisi ini berpotensi melanggengkan ketidakadilan gender yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat. Alternatif berupa penggunaan buku ajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperspektif gender berdampak pada pembentukan pengetahuan dan pemahaman siswa akan kesetaraan gender. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang pengaruh penggunaan buku ajar Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berperspektif gender terhadap pengetahuan siswa kelas lima sekolah dasar di SD Negeri Kedokan Bunder I Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu.

B.LANDASAN TEORI

Menurut Lampiran Bab IV Permendikud No. 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa buku teks pelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dasar, maka diperlukan buku teks mata

pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk sekolah dasar yang representatif sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar dan tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Buku teks merupakan bagian penting dalam pembelajaran dan salah satu penentu keberhasilan pembelajaran. Adapun pengertian buku teks menurut Muslich (2010: 50) adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa, untuk diasimilasikan. Dari pengertian tersebut, dipahami bahwa buku teks merupakan buku yang berisi materi pelajaran tertentu yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, orientasi pembelajaran maupun perkembangan siswa.

Berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, menurut Zamroni dalam Hamidi & Lutfi (2010 : 77) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan

bertindak demokratis melalui aktivitas penanaman kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Menurut Cogan dalam Winayaputra & Budimansyah (2007 : 10) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) adalah mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan untuk membentuk warga negara yang demokratis dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui kajian dan pembahasan mengenai demokrasi, hak asasi manusia, konstitusi, lembaga negara, dan lain-lain.

Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di sekolah memiliki tujuan tertentu. Menurut penjelasan Pasal 37 Ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan kewarganegaraan

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Menurut Hamidi & Lutfi (2010: 80) tujuan *civic education* (pendidikan kewargaan) adalah membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat daerah, nasional dan global; menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan demokratis; menghasilkan peserta didik yang berfikir komprehensif, analitis, kritis, dan bertindak demokratis; mengembangkan kultur demokrasi yaitu kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan melakukan dialog, negosiasi, kemampuan mengambil keputusan serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik masyarakat; mampu membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta mampu memecahkan berbagai persoalan aktual kewarganegaraan yang terus beragam dewasa ini.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dalam Wahab & Sapriya (2008: 209) yaitu berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti-korupsi; berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari beberapa tujuan pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menyiapkan warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan karakter warga negara yang positif dan demokratis sehingga mampu berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan peserta didik memiliki berbagai kompetensi yang menunjang terbentuknya karakter warga negara yang baik. Menurut Hamidi & Lutfi (2010: 79) kompetensi pendidikan kewargaan (*civic education*) terdiri dari: pertama, kompetensi dasar atau kompetensi minimal, yaitu kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*) yang terkait dengan materi inti pendidikan kewargaan antara lain demokrasi, HAM, dan masyarakat madani; kedua, kecakapan dan kemampuan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) antara lain mencakup pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan keberagaman, kepekaan terhadap masalah warga negara; ketiga, kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewargaan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dari pendapat di

atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pendidikan kewarganegaraan merupakan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan, adapun kompetensi pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pendapat di atas dikategorikan menjadi tiga yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic virtue/disposition*.

1. Pengertian Gender

Menurut Mulia (2007 : xii) gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku, dan budaya lokal.

Dari pendapat yang dikemukakan Mulia dipahami bahwa gender merupakan berbagai peran yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang merupakan bentukan sosial yang mempengaruhi tugas, fungsi, hak, kewajiban maupun kesempatan yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Sedangkan Rustanto (2015 : 104) mendefinisikan gender

sebagai perbedaan secara sosial dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh konstruksi sosial masyarakat. Pendapat yang disampaikan Rusnanto mengenai gender tidak jauh berbeda dengan yang telah dikemukakan oleh Mulia bahwa gender merupakan perbedaan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat. Adapun Oakley dalam Nugroho 2008 : 3) menyebutkan bahwa gender *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Dalam hal ini, Oakley menegaskan bahwa gender sebagai suatu perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan suatu takdir atau ketentuan Tuhan melainkan sebagai hasil bentukan masyarakat melalui proses yang panjang. Sementara menurut Fakhri (2008: 8) gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Dari definisi gender

yang dikemukakan Fakhri, gender merupakan sifat yang dilekatkan oleh masyarakat maupun budaya suatu masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konsep yang dibentuk secara kultural untuk membedakan relasi, peran, fungsi, dan tugas laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, dimana konsep gender ini cenderung memposisikan salah satu jenis kelamin lebih superior dibanding jenis kelamin yang lain, dalam hal ini perempuan seringkali diposisikan sebagai pihak yang subordinat dalam suatu relasi gender.

2. Kesetaraan Gender

Menurut Rustanto (2015: 104) kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Kesenjangan gender menurut Mulia (2008: xiv) adalah suatu kondisi

yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan ini terjadi dalam pekerjaan, pendapatan, kesempatan, penghargaan, dan lain sebagainya.

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan suatu kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki relasi, status yang sama serta kesempatan yang sama dalam mewujudkan hak asasinya sebagai seorang manusia. Upaya menghapus bentuk-bentuk ketidakadilan gender dapat dilakukan melalui berbagai cara, menurut Fakhri (2008: 157) salah satu cara untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan gender yaitu dengan melancarkan kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat. Adapun strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender menurut Fakhri (2008: 163) adalah dengan mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan dan program berbagai organisasi dan lembaga pendidikan. Pengembangan kurikulum dan metode pendidikan, dalam setiap kegiatan evaluasi, dalam kegiatan penelitian dengan mengenalkan *feminist research*,

manajemen yang berperspektif gender dan seterusnya.

Menurut Weiler dalam Fakhri (2008: 152) bahwa melakukan kegiatan pendidikan yang sifatnya pendidikan kritis (*critical education*) atau kegiatan apa saja yang akan membantu perempuan memahami pengalamannya dan menolak ideologi dan norma yang dipaksakan kepada mereka. Tujuan upaya tersebut adalah membangkitkan kritis gender (*gender critical consciousness*) yakni kesadaran akan ideologi hegemoni dominan dan kaitannya dengan penindasan gender. Dari pendapat di atas, diketahui bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun pengetahuan, keterampilan maupun sikap peserta didik untuk tidak diam dalam menghadapi berbagai stereotip gender dan yang berkaitan dengan itu. Dan buku teks yang digunakan dalam pendidikan memiliki peran besar dalam menunjang pembelajaran yang berkeadilan gender melalui materi yang disajikan dalam buku teks yang tidak bias gender dan tidak diskriminatif atas dasar gender. Namun masih banyak buku teks yang digunakan di sekolah masih bias gender, sehingga diperlukan buku

teks pelajaran di sekolah yang lebih sensitif gender dan berkeadilan gender, sehingga sekolah menjadi salah satu wahana yang berperan penting dalam melakukan transformasi sosial yang berkeadilan gender, bukan menjadi lembaga yang melanggengkan ketimpangan atau ketidakadilan gender.

3. Kelas Tinggi Sekolah Dasar

Menurut Yusuf & Sughandi (2014: 61) pada usia sekolah, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif (seperti membaca, menulis, dan menghitung atau CALISTUNG). Lebih lanjut, Yusuf & Sughandi menyatakan bahwa kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarinya. Kepada anak sudah dapat diberikan dasar-dasar keilmuan, seperti membaca, menulis, menghitung (CALISTUNG).

Disamping itu, kepada anak juga sudah dapat diberikan dasar-dasar pengetahuan yang terkait dengan kehidupan manusia, hewan,

lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, dan agama. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa anak usia sekolah tidak hanya memiliki kemampuan kognitif dasar seperti calistung, namun anak sekolah dasar dapat dibimbing untuk memperoleh pemahaman dasar mengenai realitas kehidupan baik berkaitan dengan lingkungan alam maupun sosial beserta semua kompleksitas yang ada di dalamnya sesuai dengan pemahaman atau daya nalar mereka.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Kedokan Bunder I Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu dengan subyek penelitian yaitu siswa kelas lima SDN Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu berjumlah 40 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi proses pembelajaran yang dilaksanakan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pretes dan postes untuk mengukur perubahan pengetahuan siswa terkait materi pelajaran yang dikaitkan

dengan kesetaraan gender setelah dilakukan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menggunakan buku ajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperspektif gender, wawancara dengan guru kelas untuk mengetahui perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku siswa terhadap teman kelasnya dari perspektif gender setelah mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menggunakan buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperspektif gender. Analisis data yang digunakan dengan melakukan cek data selama penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga bulan Oktober 2018, dengan perolehan hasil sebagai berikut:

a. Hasil observasi diketahui bahwa: buku ajar yang digunakan di sekolah sebelum dilakukan penelitian menggunakan buku ajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi yang kurang memperhatikan kesetaraan gender baik pada isi

maupun gambar yang disajikan; siswa kurang memiliki pemahaman akan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ini tampak pada kepemimpinan kelas dipegang oleh laki-laki, perempuan sebagai sekretaris, selain itu sikap dan perilaku siswa yang membedakan peran anak laki-laki dan anak perempuan dalam permainan, dll.

b. Hasil *pre-test* tentang materi hak dan kewajiban warga negara yang dikaitkan dengan kesetaraan gender diketahui bahwa 56% siswa menjawab tidak tepat, dan 44 % menjawab tepat. Setelah dilakukan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menggunakan buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperspektif gender, pengetahuan siswa akan kesetaraan gender meningkat, hal ini tampak pada hasil *post-test* yang mengenai materi tentang hak dan kewajiban warga negara yang dikaitkan dengan kesetaraan gender, menunjukkan hasil 87% siswa menjawab benar, dan 13% menjawab tidak tepat.

c. Hasil wawancara dengan guru kelas diketahui bahwa berkaitan

dengan buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang digunakan belum secara spesifik dikaitkan dengan pembentukan pengetahuan siswa akan kesetaraan gender, selain itu, guru menyatakan bahwa siswa masih belum mengetahui tentang kesetaraan gender tidak hanya dalam konsep, namun juga dalam sikap, dan perilaku. Sehingga perilaku siswa cenderung membedakan tugas, hak maupun peran siswa laki-laki dan perempuan, guru memberikan contoh dalam proses pembelajaran yang cenderung lebih aktif siswa laki-laki dibanding perempuan, siswa laki-laki lebih sering memimpin diskusi dibandingkan dengan siswa perempuan, pemimpin upacara lebih banyak anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, pembahasan tentang cita-cita sebagian besar anak perempuan bercita-cita memiliki profesi yang cenderung feminin, dan untuk laki-laki sebaliknya, tugas membersihkan kelas dan lingkungan cenderung menjadi tanggung jawab perempuan dibandingkan laki-laki, dll.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dianalisa bahwa isi buku ajar yang berkembang di Indonesia termasuk buku ajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih belum memperhatikan aspek kesetaraan gender baik dalam pembahasan materi maupun gambar-gambar yang disajikan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan buku ajar yang tidak hanya representatif dari segi materi sesuai dengan tingkatan pendidikan, namun diperlukan buku ajar yang memperhatikan aspek kesetaraan gender, sehingga siswa memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, maupun peran yang sama dengan relasi yang setara.

Pentingnya peran buku ajar yang berperspektif gender ditegaskan oleh Weiler dalam Fakih (2008: 152) melakukan kegiatan pendidikan yang sifatnya pendidikan kritis (*critical education*) atau kegiatan apa saja yang akan membantu perempuan memahami pengalamannya dan menolak ideologi dan norma yang dipaksakan kepada mereka. Dalam hal ini, salah satu komponen penting

yang terdapat dalam pendidikan yaitu buku ajar.

Penggunaan buku ajar berperspektif gender akan membentuk pemahaman, sikap dan perilaku peserta didik untuk tidak menerima begitu saja peran, tugas dan tanggung jawab yang dilekatkan oleh masyarakat yang cenderung diskriminatif. Sehingga buku ajar berperan penting dalam membangun perubahan yang lebih adil dalam hubungannya dengan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Hasil observasi yang menggambarkan perbedaan peran dan keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan sekolah, mencerminkan bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum membentuk pemahaman siswa akan prinsip keadilan dan kesetaraan atas dasar gender. Hasil pretes yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pengetahuan yang bias gender bahkan cenderung diskriminatif.

Hasil observasi tersebut menggambarkan bahwa siswa menganggap tidak ada yang salah dengan perbedaan hak, kewajiban maupun peran antara laki-laki dan perempuan, karena mereka telah mempelajari hal tersebut di

lingkungan sosial mereka. Ini menegaskan pernyataan disampaikan oleh Mulia (2008: xii) gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku, dan budaya lokal.

E. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembelajaran menggunakan buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diketahui perubahan pengetahuan peserta didik mengenai peran, tugas, tanggung jawab maupun relasi mereka (laki-laki dan perempuan) yang setara dan tidak dibedakan. Ini diketahui dari hasil pretes yang menggambarkan pengetahuan, peserta didik, dan diperkuat dengan perubahan sikap dan perilaku peserta didik yang lebih adil dan tidak diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, Mansour. 2008. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Hamidi, Jazim & Lutfi, Mustofa. 2010. Civic Education Antara

- Realitas Politik dan
Impelementasi Hukumnya.
Gramedia. Jakarta
- Mulia, Musdah Siti. 2007. Menuju
Kemandirian Politik
Perempuan. Kibar Press.
Yogyakarta
- Muslich, Mansur. (2010). *Text Book
Writing*. Ar-Ruzz Media.
Yogyakarta.
- Noerdin, Erdiana. 2005. *Politik
Identitas Perempuan Aceh*.
Women Research Institut.
Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. Gender dan
Strategi Pengarus-Utamaannya
di Indonesia. Pustaka Pelajar.
Yogyakarta
- Rustanto, Bambang. 2015.
Masyarakat Multikultural di
Indonesia. PT Remaja
Rosdakarya. Bandung
- Wahab, Aziz & Sapriya. 2008. *Teori
dan Landasan Pendidikan
Kewarganegaraan*. UPI Press.
Bandung.
- Winayaputra, Udin & Budimansyah,
Dasim. 2007. *Civic Education
Konteks, Landasan, Bahan Ajar,
dan Kultur Kelas*. Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan
Sekolah Pascasarjana UPI.
Bandung
- Yusuf, Syamsu & Sughandi, Nani.
2014. *Perkembangan Peserta
Didik*. PT. RajaGrafindo Persada.
Jakarta.
- Undang Undang No. 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
- Permendikbud No. 65 Tahun 2013
Tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah